

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Oktober 2014, pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo, telah memprioritaskan peningkatan investasi, termasuk investasi asing, untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹ Indonesia memiliki rencana ambisius untuk meningkatkan infrastrukturnya dengan fokus pada perluasan akses ke energi, memperkuat koridor transportasi lautnya, yang meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, kereta api dan bandara, serta peningkatan produksi pertanian, telekomunikasi, dan jaringan broadband di seluruh negara.² Rencana peningkatan ini dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan investasi asingnya.

Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengurangi hambatan peraturan untuk investasi asing.³ Hambatan regulasi, dalam hal ini, berarti hambatan yang melibatkan aturan dan prosedur yang rumit yang dapat menyebabkan penundaan lama dalam hal investasi asing. Indonesia telah mencoba untuk mengurangi hambatan investasi asing dengan mengumumkan penciptaan "one-stop-shop" untuk izin pada tahun 2015 di Badan Koordinasi Penanaman

¹ IBP Inc. Asia Tenggara: Sumber Daya Investasi dan Modal untuk Buku Pegangan Negara-Negara Asia Tenggara - Informasi Strategis, Peluang, Kontak, Vol. 1. hal. 40

² Ibid. hal. 41.

³ Ibid. hal. 42.

Modal (BKPM).⁴ One-stop-shop bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sedemikian rupa sehingga perusahaan tidak perlu lagi mengunjungi beberapa agen lokal yang berbeda untuk mendapatkan izin. Pusat-pusat tersebut bertujuan untuk merampingkan perizinan bisnis dengan mengintegrasikan wewenang untuk mengeluarkan lisensi, yang biasanya berlokasi di berbagai kantor pemerintah yang berbeda, menjadi satu departemen pemerintah.⁵

Sayangnya, ada beberapa faktor yang masih menciptakan iklim investasi yang agak sulit dan kompleks, seperti nasionalisme ekonomi, kepentingan domestik yang kuat, terutama dalam faktor hukum, seperti proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan ketidakpastian hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Thomas Lembong, Kepala BKPM, peraturan di Indonesia tentang investasi asing cenderung tumpang tindih antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, yang dapat membingungkan bagi investor.⁶

Kemudian pada tahun 2018, khususnya pada tanggal 21 Juni 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Usaha Terpadu Elektronik, yang selanjutnya disebut PP No. 24/2018, yang merupakan upaya terbaru untuk memitigasi hambatan regulasi yang saat ini dimiliki Indonesia. PP No. 24/2018 mencerminkan tujuan Pemerintah untuk beralih dari system pengawasan sebelum mulai ke pengawasan

⁴ Steer, Liesbet . *Perizinan Bisnis dan One Stop Shop di Indonesia* . The Asia Foundation. Jakarta, Indonesia. November 2006, hal. 2.

⁵ Ibid, hal. 4.

⁶ Normala , Adinda . "Indonesia Menarik Lebih Banyak Investasi Asing Langsung pada 2017." Jakarta Globe.

setelah mulai, yang dilakukan dengan mengurangi sejumlah besar izin usaha dan izin yang diperlukan serta menyederhanakan proses aplikasi mereka.⁷

Salah satu mandat dari GR No. 24/2018 adalah untuk mendirikan apa yang disebut portal Online Single Submission (OSS), sebuah platform online yang mengintegrasikan proses pengajuan berbagai izin regulasi di satu tempat. Portal OSS bertujuan untuk memberikan layanan 24 jam kepada para pebisnis dengan layanan 24-7 untuk menerima semua izin. Program keamanan sosial, izin lokasi, izin lingkungan, izin konstruksi bangunan, dan rencana pemanfaatan karyawan di masa depan adalah di antara izin yang dapat diberikan melalui portal OSS.⁸

Portal OSS akan dioperasikan dan dikelola oleh OSS Body. Berdasarkan definisi yang diberikan dalam PP No. 24/2018, BKPM kemungkinan akan menjadi Badan OSS. Namun demikian, untuk sementara, portal OSS akan dipelopori oleh Kementerian Ekonomi sampai BKPM dianggap siap untuk mengambil alih.⁹ Meskipun masih harus dilihat bagaimana portal OSS ini akan berfungsi, karena baru beroperasi pada 9 Juli 2018, diharapkan hal ini akan mengarah pada kemudahan pengajuan aplikasi dan pembayaran online biaya izin.¹⁰

Di Indonesia, setelah perusahaan dibentuk dan sebelum mulai mendaftarkan, perusahaan perlu mendapatkan sejumlah izin seperti izin fisik, seperti izin bangunan dan izin sektoral, seperti izin perdagangan atau izin industri. Langkah-

⁷ Assegaf Hamzah & Partners. . “Merger & Akuisisi: Pengajuan Tunggal Online Upaya Terbaru Indonesia Untuk Meningkatkan Kemudahan Berbisnis”. Indonesia. Juli 2018. hal. 1

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

langkah ini kemudian diikuti oleh pendaftaran perusahaan yang sebenarnya, yang terjadi dengan pemerintah daerah. Setelah perusahaan terdaftar secara resmi, izin khusus dan izin kegiatan selanjutnya diperoleh.

Berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia, terutama dalam hal perizinan, mengelola berbagai langkah dalam proses awal investasi. Langkah-langkah pertama terkait dengan mendapatkan akta hukum dan nomor pajak dikelola oleh kementerian nasional, seperti Kementerian Kehakiman dan Kementerian Keuangan. Selain itu, langkah-langkah selanjutnya, yang meliputi memperoleh izin pendaftaran dan lisensi lainnya, sebagian besar dikelola di tingkat lokal atau kabupaten.

Distrik yang menangani lisensi ini juga memerlukan berbagai surat rekomendasi, pengesahan dan tanda tangan dari otoritas tingkat kecamatan atau lingkungan. Untuk mendapatkan lisensi ini, diperlukan interaksi dengan pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan bahkan tingkat lingkungan.¹¹ Struktur administrasi pemerintah Indonesia memiliki hierarki yang berbunyi sebagai berikut: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).

Proses perizinan yang bermasalah dan kompleks ini adalah alasan utama mengapa iklim investasi Indonesia lebih rendah daripada beberapa negara di ASEAN. Kompleksitas dalam proses untuk berinvestasi di Indonesia tidak membuat Indonesia menarik bagi banyak investor karena terlalu banyak upaya

¹¹ Steer, *op. cit.*, hal. 9.

untuk dimasukkan. Proses investasi keras mungkin tidak menarik bagi banyak investor karena dapat menghabiskan banyak uang, waktu dan usaha.

Selain aspek hukum dari hambatan, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, juga dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menyelidiki dan mengadili kasus korupsi tingkat tinggi, di mana ¹² Investor menganggap sebagai penghalang substansial dalam iklim investasi Indonesia. Hambatan lain termasuk lambatnya pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, koordinasi pemerintah yang buruk, penegakan kontrak yang buruk, lingkungan peraturan yang tidak pasti, dan terutama, kurangnya transparansi dalam pengembangan undang-undang dan peraturan.

Selain itu, ada beberapa pembatasan pada beberapa bisnis impor dan ekspor, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan untuk Investasi (*Negative List*). *Negative List* menetapkan sektor mana yang terbuka untuk investasi asing di Indonesia serta persentase kepemilikan asing yang diizinkan. Di bawah Keputusan Presiden yang disebutkan di atas, tekanan untuk membuat komitmen investasi jangka panjang yang substansial dan juga faktor ke dalam rencana investor asing juga diperlukan. Berkenaan dengan Daftar Negatif, tercantum rincian sektor di mana investasi asing dibatasi dan menguraikan batas ekuitas asing di sejumlah sektor.

Negative List memungkinkan investasi asing yang lebih besar di beberapa sektor, termasuk e-commerce, film, pariwisata, dan logistik. Dalam perawatan

¹² IBP Inc. Asia Tenggara: Sumber Daya Investasi dan Modal untuk Buku Pegangan Negara-Negara Asia Tenggara - Informasi Strategis, Peluang, Kontak, Vol. 1. hal. 42

kesehatan, daftar tahun 2016 melonggarkan pembatasan pada investasi asing dalam kategori seperti layanan manajemen rumah sakit dan pembuatan bahan baku untuk obat-obatan, tetapi memperketat pembatasan pada yang lain seperti rehabilitasi mental, klinik gigi dan khusus, layanan keperawatan, serta pembuatan dan distribusi perangkat medis. Energi dan pertambangan masih menghadapi hambatan investasi asing yang signifikan.

Menurut skripsi Hadidtya Surya Nugraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro tahun 2014 berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012”, investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran investasi atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam dan luar negeri.¹³ Selain itu, skripsi Miftachul Ulum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah tahun 2014 berjudul “Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Infrastruktur Dan Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2000-2012)” menjelaskan tentang komponen utama investasi, yaitu dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, karena secara teoritis, peningkatan investasi akan meningkatkan volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan

¹³ Nugraha, Hadidtya Surya. “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012”. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. 2014. hal. 20.

memperluas peluang kerja produktif dan akan meningkatkan per kapita pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁴

Perbedaan antara tesis ini dan 2 skripsi masa lalu disebutkan terletak dalam tujuan skripsi mereka.. “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investasi Asing, Investasi Dalam Negeri, dan Investasi Regional terhadap Produk Domestik Bruto di Jawa Tengah pada periode 1980 hingga 2012.¹⁵ Selain itu, “Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Infrastruktur Dan Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2000-2012)” bertujuan untuk menganalisis pengaruh FDI, infrastruktur dan pengangguran di Produk Domestik Regional Bruto provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan data dari periode 2000 hingga 2012.¹⁶ Bahwa dalam tesis ini, ia berkonsentrasi pada masalah kebijakan izin usaha sehubungan dengan FDI di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan iklim investasi menjadi lebih baik, dengan menganalisis dan membandingkan kebijakan izin usaha Indonesia dengan anggota ASEAN lainnya. kebijakan negara yang saat ini berperingkat lebih tinggi dari Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.¹⁷

¹⁴ Ulum, Miftachul. “Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Infastruktur Dan Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2000-2012)”. Fakultas Ekonimika dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014. hal. 27.

¹⁵ Nugraha, op. cit., hal. viii.

¹⁶ Ulum, op. cit., hal. iii.

¹⁷ "Ranking 2018." A Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index - Ben Jelili Riadh. 2018. <http://www.fdiattractiveness.com/ranking-2018/>.

Menurut *the Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index* (GFICA Index), Indonesia berada di belakang 4 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada peringkat FDI 2018, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.¹⁸ Indonesia saat ini peringkat 68th, di belakang Singapura peringkat 6th, Malaysia peringkat 31st, Thailand peringkat 42nd dan Vietnam peringkat 56th. Peningkatan ini didasarkan pada beberapa basis data fundamental yang diproses oleh Indeks GFICA, yang membuatnya sangat andal untuk tesis ini. Basis data mencakup basis data UNCTAD,¹⁹ WIPO,²⁰ ILO-KILM,²¹ and the CDIS, DOTS, FAS, IFS and WEO dari IMF,²² dan database lainnya. dalam hal Foreign Direct Investment (FDI). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam 10 anggota ASEAN, Indonesia masih berada di bawah peringkat Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Tesis ini akan mengandalkan fakta bahwa Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan banyak potensi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tetapi peringkatnya di bawah 4 negara yang lebih kecil di wilayahnya sendiri.

Ada beberapa faktor yang dapat disimpulkan mengapa Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang merupakan ekonomi Indonesia dan penduduknya. Dengan Produk

¹⁸ Ibid.

¹⁹ UNCTAD. "UNCTADstat." UNCTADstat. 2018. <http://unctadstat.unctad.org/EN/>.

²⁰ "Pengetahuan." WIPO - Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. 2018. <http://www.wipo.int/reference/en/>.

²¹ "Topik Terpilih Statistik Tenaga Kerja ." International Labour Organization. 2018. <https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/lang--en/index.htm>.

²² "Data IMF." IMF. 2018. <https://www.imf.org/en/Data>.

Domestik Bruto (PDB) lebih dari \$930 Miliar,²³ Indonesia memiliki ekonomi terbesar di ASEAN sejauh ini. GDP r menunjukkan total nilai dolar semua barang dan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, sering disebut sebagai ukuran ekonomi. Namun, kekayaan Indonesia, yang merupakan total nominal PDB dibagi dengan jumlah orang dalam populasi, lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand, tetapi di atas Vietnam.²⁴ Selain itu, Indonesia adalah negara ASEAN terbesar dengan banyak wilayah yang tersebar, dengan itu menjadi negara kepulauan. Faktor - faktor ini menentukan bahwa Indonesia tidak dapat dibandingkan berdasarkan kemampuannya untuk dapat mengelola semua daerah dalam satu manajemen karena ukuran negara dan fakta bahwa Indonesia masih merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, tesis ini, alih-alih menjadi kritik, akan lebih fokus pada menyarankan bagaimana Indonesia seharusnya mengelola sistem OSS-nya di bawah GR. 24/2018, dengan melihat peraturan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam tentang lisensi bisnis untuk FDI.

Dalam hal FDI, ini telah menjadi sumber penting keuangan internasional di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. FDI telah berkembang dalam hal distribusi sektoral dan pencarian pasar telah menjadi motivasi utamanya.²⁵ Rezim FDI Indonesia biasanya agak membatasi dan diliberalisasi hanya pada saat kesulitan ekonomi. Ada kemungkinan, bahkan kemungkinan, bahwa pembatasan FDI telah mahal dalam hal hilangnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

²³ "Indonesia: 5 Infografis tentang Penduduk, Kekayaan, Ekonomi." ASEAN UP. Terakhir diubah 26 Maret 2018. <https://aseanup.com/indonesia-infographics-population-wealth-economy/>.

²⁴ "Indonesia: 5 Infografis tentang Penduduk, Kekayaan, Ekonomi." ASEAN UP. Terakhir diubah 26 Maret 2018. <https://aseanup.com/indonesia-infographics-population-wealth-economy/>.

²⁵ Cohen, Stephen D. "1. Pendekatan yang Lebih Baik untuk Memahami Investasi Asing Langsung dan Perusahaan Multinasional." *Perusahaan Multinasional dan Investasi Langsung Asing Tidak Disederhanakan* (nd). hal. 11-27.

Aliran masuk FDI memainkan peran kecil di Indonesia sampai liberalisasi pada awal 1990-an karena krisis ekonomi pada tahun 90-an.²⁶ Arus masuk FDI pada tahun 2005 lebih tinggi dari pada puncak sebelumnya pada tahun 1996, dan mereka meningkat lebih lanjut, sebesar 170 persen, dari tahun 2005 hingga 2014. Selain itu, pertumbuhan yang kuat berlanjut pada tahun 2015, karena FDI meningkat hampir 20 persen dari tahun 2014 hingga 2015, menurut BKPM.²⁷ Dalam beberapa tahun terakhir, FDI berkontribusi pada perubahan struktural dalam ekonomi, yang meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan pekerja di Indonesia di beberapa sektor.²⁸ Ada indikasi efek seperti itu di Indonesia, seperti pertumbuhan lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi dikombinasikan dengan ukuran perusahaan asing yang relatif besar berarti mereka berkontribusi dengan lapangan kerja besar di sektor bernilai tambah tinggi. Pertumbuhan lapangan kerja relatif tinggi di perusahaan-perusahaan milik asing di sektor manufaktur Indonesia. Peningkatan nilai tambah akan menguntungkan seluruh negara melalui saluran yang berbeda, khususnya, nilai tambah akan berkontribusi pada keuntungan dan upah yang lebih tinggi.

Dalam meningkatkan aliran masuk FDI, menciptakan iklim yang menguntungkan bagi investasi sangat penting. Ini membutuhkan pembentukan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta berdasarkan transparansi yang lebih besar dalam administrasi publik dan organisasi perantara yang kuat seperti kamar dagang, dewan bisnis, profesional dan asosiasi, yang dapat melibatkan

²⁶ Kartasasmita, Ginanjar. "Globalisasi dan Krisis Ekonomi: Kisah Indonesia. hal. 3.

²⁷ BKPM. "Realisasi Investasi PMDN dan PMA Triwulan". 25 April 2016.

²⁸ Investasi, Indonesia. "Ekonomi Indonesia - Pasar Berkembang Asia - Ekonomi | Investasi Indonesia." Berinvestasi di Indonesia | Investasi Indonesia. Terakhir diubah pada 5 Februari 2019. <https://www.indonesia-investments.com/culture/economy/item177?>

negara dalam dialog rutin. Selain itu, negara dan pemerintah memiliki peran penting untuk dimainkan, tetapi pemerintah perlu mendorong, menstimulasi, mengatur, dan melengkapi sektor swasta, daripada bersaing dengannya atau berupaya menggusur, melemahkan, dan mengeksploitasinya.

Selain iklim investasi, menjaga stabilitas ekonomi dan politik, sebagai prasyarat umum untuk meningkatkan FDI dan mengintensifkan kerja sama regional.²⁹ Dengan integrasi regional yang lebih besar, setiap negara akan memiliki pasar yang meningkat untuk barang-barang tertentu. Arus masuk ke Indonesia telah meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan FDI secara umum di seluruh dunia dan oleh peningkatan dari aliran masuk yang sebelumnya rendah yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan. Terlepas dari peningkatan arus masuk, FDI tampaknya sedikit kurang penting di Indonesia daripada di banyak negara tetangga.

Iklim investasi sangat penting untuk menarik FDI yang mencari pasar, terutama di sektor jasa. Ini juga penting untuk hubungan antara FDI dan investasi domestik.³⁰ Pentingnya iklim investasi suatu negara tidak dapat diabaikan, terutama saat menjelaskan transfer dana jangka panjang seperti arus masuk FDI. Setelah bertahun-tahun menyelesaikannya, Pemerintah Indonesia berusaha untuk mendukung aliran FDI ke sektor infrastruktur. Salah satu contoh penting dari upaya ini adalah Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), perusahaan milik negara yang didirikan oleh Kementerian Keuangan.

²⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia". Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa: 2018. hlm. 81.

³⁰ Cohen, op. cit., hal. 11-27.

Sebagai salah satu alat fiskal pemerintah, IIGF berada di bawah pengawasan langsung Menteri Energi dan memiliki mandat untuk memberikan jaminan bagi proyek-proyek infrastruktur yang termasuk dalam kerangka Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) yang disetujui. PII adalah salah satu bagian dari upaya pemerintah yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memberikan dukungan darurat dan jaminan untuk risiko yang disebabkan oleh tindakan pemerintah, atau tidak bertindak, yang merusak kelayakan ekonomi dari KPS. Jaminan PII dimaksudkan untuk menjamin risiko politik baik pemerintah pusat dan daerah sebagai Badan Penandatanganan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor. PII juga bekerja sama dengan lembaga internasional dan multilateral dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menjamin proyek infrastruktur berskala besar. PII didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia; dengan memberikan jaminan melalui proses yang akuntabel, transparan dan kredibel. Selanjutnya, Penjaminan PII akan meningkatkan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur, yang dapat menghasilkan biaya pembiayaan yang lebih rendah sehingga memastikan pembiayaan swasta untuk proyek-proyek infrastruktur. Bagi pemerintah sebagai pemilik proyek, jaminan PII dapat meningkatkan kepastian partisipasi sektor swasta dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. PII juga membantu pemerintah melalui pembentukan struktur transaksi yang baik untuk meningkatkan kepastian transaksi

yang sukses dengan investor yang mengarah pada pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.³¹

Upaya reformasi pemerintah meningkatkan lingkungan bisnis yang masih menantang di Indonesia dan deregulasi telah meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat Kemudahan Berbisnis Bank Dunia, seperti pada edisi terbaru, Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 190 negara, yang merupakan Munculnya 37 tempat dalam dua tahun.³² Iklim investasi yang membaik di Indonesia berkontribusi pada keuangan eksternal yang lebih kuat, dengan FDI sebagai tujuan utamanya. Ruang lingkup tesis ini akan berada dalam rezim FDI Indonesia, seperti regulasi dan hambatan yang menyebabkan Indonesia berada di bawah beberapa negara ASEAN, dengan tujuan membuat regulasi Indonesia menjadi hambatan substansial yang lebih baik. Tantangannya adalah apakah Indonesia dapat meningkatkan iklim investasi mereka dengan mengurangi hambatan hukum yang substansial sehingga investor asing mau berinvestasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Skripsi ini bertujuan untuk membimbing negara kita, Indonesia, menuju iklim investasi yang lebih baik dan lebih cerah dengan melakukan analisis hukum menyeluruh melalui undang-undang investasi di Indonesia, yang mencakup kebijakan mengenai FDI. Skripsi ini akan mengambil analisis hukum komparatif undang-undang investasi Indonesia dengan undang-undang investasi negara-

³¹ WEBARQ ~ Daniel Simangunsong. "PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)." PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Oktober 23, 2018. <http://www.iigf.co.id/en/business/overview>.

³² Ease of Doing Business. "Rankings." World Bank. 2018. <http://www.doingbusiness.org/en/rankings>.

negara ASEAN berperingkat tinggi, yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Analisis komparatif kemudian dapat ditetapkan sebagai panduan tentang bagaimana meningkatkan iklim investasi Indonesia dengan meninjau undang-undang negara lain. Skripsi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa hukum saat ini yang mengatur perizinan bisnis untuk FDI di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam?
2. Bagaiman implementasi undang-undang perizinan bisnis untuk FDI di Indonesia, Singapure, Malaysia, Thailand dan Vietnam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada ayat sebelumnya, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mengenai perizinan bisnis untuk FDI di Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN terpilih lainnya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi undang-undang tentang perizinan bisnis untuk FDI di Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN terpilih lainnya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan tambahan yang berarti bagi teori mengenai perkembangan praktis iklim investasi Indonesia, khususnya terkait dengan FDI, berdasarkan pada tujuan Indonesia untuk meningkatkan iklim investasinya. Pengembangan praktis berarti proses transformasi hukum yang didasarkan pada analisis perbandingan hukum dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan peraturan FDI Thailand.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memiliki penjelasan yang jelas mengenai masalah arus yang dinilai sebagai hambatan oleh sebagian besar investor asing, di mana dapat membantu negara kita, Indonesia, untuk benar-benar memahami masalah dan juga solusinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis terkait dengan manfaat penelitian hukum dengan penilaian praktis tentang cara meningkatkan iklim investasi Indonesia. Skripsi ini memiliki pola pikir bahwa jika Indonesia benar-benar dapat meningkatkan iklim investasinya, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing, yang kemudian akan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi Indonesia. Skripsi ini akan memaparkan beberapa penilaian praktis dari negara-negara ASEAN yang berperingkat lebih tinggi, seperti peraturan FDI mereka dan hambatan iklim investasi. Penilaian praktis lainnya, seperti faktor sosial dan faktor lingkungan juga akan dinilai secara singkat jika mereka mempengaruhi iklim investasi.

Penelitian ini akan mengabstraksi aplikasi praktis dari kebijakan yang ada di negara-negara lain di ASEAN sehubungan dengan iklim investasi mereka. Aplikasi praktis ini kemudian akan digunakan sebagai rekomendasi bagi Indonesia untuk dipertimbangkan sehingga perbaikan dalam iklim investasi kita sehubungan dengan FDI benar-benar dapat dicapai. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dengan menggunakan peraturan FDI negara ASEAN tinggi-peringkat sebagai contoh nyata, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk regulasi FDI Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pembaca bacaan yang mudah, dengan ini adalah ringkasan singkat dari skripsi, yang akan dinilai lebih lanjut dalam setiap bab. Bab-babnya adalah:

BAB I : Pengantar

Di bawah BAB I, penulis menjelaskan latar belakang masalah yang menjabarkan premis dan masalah skripsi ini, pertanyaan penelitian yang memandu penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang ada di bawah penelitian pertanyaan, dan juga manfaat penelitian, yang dibagi menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Selain itu, sistematika penulisan juga akan dinilai di bawah BAB I.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Di bawah BAB II, penulis memberikan penjelasan literatur tentang setiap kata kunci dalam hal definisi dan dasar hukumnya, baik di bawah hukum internasional dan hukum Indonesia. Definisi dan dasar hukum ditulis berdasarkan penelitian teoritis, yang belum termasuk analisis masalah. BAB II bertujuan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh dan terperinci tentang poin-poin utama utama tesis ini, yang dapat membantu pembaca untuk lebih memahami rangkaian keadaan skripsi ini.

BAB III : Metode Penelitian

Di bawah BAB III, penulis memberikan penjelasan terperinci mengenai akan membahas pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, bahan hukum dan teknik penelitian yang digunakan dalam tesis ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang dinilai dengan menulis formulasi yang terdiri dari teori ahli, pendapat ahli, teori dan persyaratan hukum.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Di bawah BAB IV, diskusi tentang masalah penelitian bersama dengan pemecahan masalah berdasarkan pada landasan teoritis, prinsip-prinsip hukum dan peraturan

terkait. Dalam bab ini, penulis akan menulis analisis mengenai:

- a. Kedudukan hukum dari izin usaha menurut hukum terkait di Indonesia , Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam ; dan
- b. Penerapan lisensi ini memerlukan persyaratan di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Di bawah BAB V, penulis akan menulis mengenai komentar penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari skripsi ini dan saran dari pendapat penulis berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan dianalisis.